

PEDOMAN WAWANCARA
Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis
Sekolah di Kecamatan Kalideres

I. INFORMAN UTAMA

- A. Orang tua dan Komite Sekolah
1. Partisipasi orang tua dan Komite Sekolah dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
 - a. Orang tua dan Komite Sekolah terlibat aktif dalam kegiatan sekolah
 - b. Bentuk partisipasi orang tua dan Komite Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan sekolah
 2. Terlaksananya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah ditinjau dari delapan standar nasional pendidikan
 - a. Orang tua dan Komite Sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam pengembangan:
 - Standar isi
 - Standar proses
 - Standar kompetensi kelulusan
 - Standar pendidik dan tenaga kependidikan
 - Standar sarana dan prasarana
 - Standar pengelolaan
 - Standar pembiayaan
 - Standar penilaian pendidikan
 - b. Bentuk partisipasi orang tua dan Komite Sekolah dalam pengembangan standar isi (kurikulum)
 - Standar isi
 - Standar proses

- Standar kompetensi kelulusan
 - Standar pendidik dan tenaga kependidikan
 - Standar sarana dan prasarana
 - Standar pengelolaan
 - Standar pembiayaan
 - Standar penilaian pendidikan
3. Hambatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
 - a. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
 - b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam yang ada

B. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perwakilan Masyarakat

1. Peranan LSM dan perwakilan masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
 - a. LSM dan perwakilan masyarakat mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
 - b. Peranan atau keterlibatan LSM dan perwakilan masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
2. Terlaksananya partisipasi LSM dan perwakilan masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
 - a. Partisipasi LSM dan perwakilan masyarakat dalam pengembangan standar isi (KTSP/kurikulum)
 - b. Partisipasi LSM dan perwakilan masyarakat dalam pengembangan standar sarana dan prasarana
 - c. Partisipasi LSM dan perwakilan masyarakat dalam pengembangan standar proses
 - d. Partitipasi LSM dan perwakilan masyarakat dalam pengembangan standar pembiayaan

3. Hambatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
 - a. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
 - b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam yang ada

II. INFORMAN PENDUKUNG

A. Kepala Sekolah

1. Partisipasi masyarakat dalam implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan
2. Peranan Kepala Sekolah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
3. Hambatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
 - a. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
 - b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam yang ada

B. Pemerintah Pusat

1. Peranan Pemerintah pusat dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
 - a. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
2. Hambatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
 - a. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
 - b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam yang ada

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara tanggal 3 Desember 2009

Focus Group Discussion

Informan:

1. Orang tua siswa kelas VII SMP Negeri 278 yaitu Bapak Arif Hidayat (A);
2. Orang tua siswa kelas VIII SMP Negeri 278 yaitu Bapak Asnawi (B);
3. Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 278 yaitu Bapak Nisan Sarwo Edi (C).

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Mengenai keterlibatan aktif orang tua dan komite sekolah dalam kegiatan sekolah		
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah ikut membantu penyelenggaraan kegiatan sekolah?	A: Iya, ikut membantu seperti dalam kegiatan keagamaan (idul adha) dan kegiatan kesenian.	1
		B: Ya, ikut membantu dalam mengawasi anak belajar.	1
		C: Iya, ikut membantu dalam program sekolah seperti kerjasama dengan orang tua dan pihak sekolah mengenai tata tertib sekolah.	1
	b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pelaksanaan kegiatan sekolah?	A: Memberikan sumbang saran dan ide dalam rapat.	2
		B: Diundang sekolah untuk membicarakan permasalahan	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>belajar anak dan prestasi anak di sekolah jika anak berperilaku tidak baik, kami sebagai orang tua membantu sekolah untuk memperbaiki perilakunya.</p>	
		<p>C: Menjelaskan kepada orang tua dan masyarakat sekolah bukan gratis tetapi terjangkau, menjalin kerjasama orang tua dengan pihak sekolah mengenai disiplin. Ikut membantu pemecahan masalah mengapa siswa tidak hadir di sekolah dan membantu orang tua untuk memotivasi anak dalam belajar.</p>	2
2.	<p>Mengenai terlaksananya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan KTSP (standar isi) dan pembelajaran.</p>		
	<p>a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam pengembangan KTSP dan pembelajaran?</p>	<p>A: Ada sekolah menginformasikan kepada orang tua untuk terlibat dalam penyusunan KTSP.</p>	
		<p>B: Informasi di dapat dari komite sekolah.</p>	
		<p>C: Komite sekolah terlibat dalam penyusunan KTSP bersama-sama dengan sekolah dan orang tua.</p>	

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
	b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan KTSP dan pembelajaran?	A: Terlibat dalam rapat koordinasi persiapan proses belajar yang diadakan oleh sekolah.	2
		B: Mengikuti rapat kerja juga yang membahas penyusunan KTSP.	2
		C: Komite sekolah bersama dengan orang tua siswa mengikuti rapat koordinasi pada awal bulan Juli lalu di sekolah dengan kesepakatan raker meliputi kalender pendidikan sekolah, jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan pengembangan proses belajar dan penilaian.	2
3.	Mengenai terlaksanya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan.		
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan?	A: Sekolah mengemukakan mengenai rencana pengembangan sarana dan prasarana pada rapat orang tua siswa.	
		B: Ada dikemukakan dalam rapat.	
		C: Sekolah menginformasikan mengenai rehabilitasi ruang belajar dan pengadaan kursi.	
	b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dan komite sekolah	A: Diminta memberikan sumbangan namun hampir	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
	dalam pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan?	tidak ada mau menyumbang karena kami hanya buruh pabrik yang penghasilannya sedikit	
		B: Kemampuan untuk menyumbang dalam bentuk dana terbatas.	2
		C: Komite sekolah berusaha untuk membantu sekolah dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk rehabilitasi ruang belajar. Hasil yang didapat sangat sedikit.	2
4.	Mengenai terlaksananya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar pembiayaan pendidikan.		
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam pengembangan standar pembiayaan pendidikan?	A: Iya.	
		B: Ada.	
		C: Cukup.	
	b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar pembiayaan pendidikan?	A: Diikutsertakan dalam penyusunan dan penyampaian rancangan anggaran pembelanjaan sekolah.	2
		B: Ikut terlibat dalam membantu sekolah untuk menghimpun sukarela.	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		C: Bersama-sama dengan orang tua dan sekolah menyusun dan menyiapkan rencana anggaran belanja sekolah.	2
5.	Mengenai terlaksananya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam peningkatan mutu kelembagaan dan manajemen.		
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam peningkatan mutu kelembagaan dan manajemen?	A: Ada terutama informasi dan undangan untuk hadir dalam acara lomba kebersihan.	
		B: Ada.	
		C: Komite sekolah sebagai wadah bagi masyarakat untuk membudayakan 7K di lingkungan sekolah.	
	b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan mutu kelembagaan dan manajemen?	A: Diundang oleh sekolah untuk hadir dalam acara kesenian dan kebersihan sekolah (acara 17 Agustus).	2
		B: Diundang sekolah dalam perayaan hari besar agama dan pertemuan orang tua siswa awal tahun.	2
		C: Mengembangkan hubungan yang baik antara sekolah dengan orang tua dalam hal keamanan, ketertiban dan kebersihan.	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
6.	Mengenai faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat.		
	Apa saja faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan manajemen berbasis sekolah?	A: Sekolah kurang aktif mengajak orang tua dan masyarakat dalam program sekolah.	3
		B: Kemampuan ekonomi terbatas.	3
		C: Pemahaman masyarakat yang kurang mengenai konsep MBS. Masyarakat menyerahkan semua urusan belajar mengajar siswa kepada sekolah. Faktor lain, dengan adanya dana BOS, masyarakat jadi kurang aktif berpartisipasi karena menganggap sekolah sudah gratis. Terutama kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang masih kurang mampu.	3
	Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi?	A: Sekolah harus percaya kepada masyarakat untuk dilibatkan dalam pengelolaan sekolah	4
		B: Penyadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	4
		C: Mengundang masyarakat dalam setiap kegiatan sekolah	4

Kode :

1. Partisipasi aktif orang tua dan komite sekolah
2. Bentuk Partisipasi orang tua dan komite sekolah
3. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi
4. Upaya mengatasi hambatan

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara tanggal 1 Desember 2009

Focus Group Discussion

Informan:

1. Orang tua siswa kelas 7 SMP Negeri 225 yaitu Bapak M. Toha (A);
2. Orang tua siswa kelas 9 SMP Negeri 225 yaitu Bapak Budi (B);
3. Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 225 yaitu Bapak Drs. T. Adi Wijaya (C).

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
7.	Mengenai keterlibatan aktif orang tua dan komite sekolah dalam kegiatan sekolah		
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah ikut membantu penyelenggaraan kegiatan sekolah?	A: Iya, kami diundang sekolah untuk menghadiri rapat orang tua siswa yang dihadiri oleh pihak sekolah dan komite sekolah.	1
		B: Ya, ada diundang. Terakhir mengikuti rapat pada tanggal 30 Agustus 2009.	1
		C: Iya, ikut terlibat. Komite sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa dan kepala sekolah untuk melaksanakan program sekolah dikaitkan dengan 8 standar nasional pendidikan yang harus diterapkan oleh sekolah.	1
	b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pelaksanaan kegiatan	A: Pada saat acara keagamaan seperti lebaran haji, orang tua diberitahukan oleh sekolah untuk	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
	sekolah?	berpartisipasi dalam menyumbang hewan kurban yang besarnya biaya tidak ditentukan dan sumbangan sukarela dari masyarakat.	
		B: Kami membantu sekolah dengan memberikan masukan dan pendapat mengenai memotivasi anak untuk belajar dan juga pernah membantu sekolah memperbaiki saluran air bersama warga lainnya.	2
		C: Sesuai dengan fungsi komite sekolah, kami menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat dengan terlibat secara aktif pada setiap kegiatan sekolah seperti mengadakan rapat pertemuan untuk membicarakan mengenai penyusunan kurikulum/KTSP, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, membantu orang tua untuk memotivasi anaknya supaya belajar secara efektif, lalu membantu sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana walaupun bentuknya sangat minim atau terbatas. Disamping itu juga bersama orang tua mengembangkan pembelajaran	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>model PAKEM dan mensosialisasikan budaya disiplin kepada warga sekolah, orang tua, dan masyarakat.</p> <p>Dari segi pendanaan, komite sekolah hanya sebagai fasilitator atau pemberi pertimbangan terhadap sekolah.</p>	
8.	Mengenai terlaksananya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan KTSP (standar isi).		
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam pengembangan KTSP?	A: Iya, ada informasi yang diberikan sekolah melalui rapat pertemuan orang tua, kepala sekolah menyampaikan beberapa hal penting dalam penyusunan dan pengembangan KTSP.	
		B: Iya, saya pernah mendengarnya dari orang tua siswa lain karena pada saat rapat pertemuan orang tua yang membahas KTSP saya tidak hadir.	
		C: Iya, orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi mengenai penyusunan dan pengembangan KTSP.	
	b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam	A: Orang tua pernah diundang untuk hadir dalam rapat, tetapi kurang	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
	pengembangan KTSP?	mengerti tentang kurikulum	
		B: Tidak pernah terlibat dalam pengembangan silabus/KTSP. Sekolah sudah mengundang tetapi tidak bisa hadir.	2
		C: Komite sekolah secara aktif terlibat dalam pengembangan standar isi kurikulum atau pengembangan silabus KTSP. Bersama sekolah mengadakan pertemuan untuk melakukan pengembangan, pemetaan, pengelompokan materi pelajaran, dan mengadakan musyawarah bersama guru membentuk MGMP.	2
9.	Mengenai terlaksananya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam standar pendidik		
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam standar pendidik?	A: Kurang. Sekolah kurang memberikan informasi mengenai kompetensi guru di sekolah.	2
		B: Tidak paham mengenai standar pendidik.	2
		C. Mengetahui tentang penetapan standar pendidik di sekolah, sekolah menginformasikan kepada komite sekolah mengenai pelatihan komputer.	2
	b. Bagaimana bentuk partisipasi	A: Tidak ada.	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
	orang tua dan komite sekolah dalam standar pendidik?		
		B: Tidak mengetahui dan tidak paham.	2
		C: Peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu mengoperasikan komputer telah dilakukan kerja sama antara sekolah, komite sekolah dengan dinas pendidikan. Komite sekolah memberikan masukan mengenai penilaian guru yang berprestasi (penilaian secara berkala).	2
10.	Mengenai terlaksananya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar proses pembelajaran.		
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam pengembangan standar proses pembelajaran?	A: Iya, informasi yang diberikan sekolah mengenai tingkat kemajuan pembelajaran anak di sekolah jika anak bermasalah dengan nilai-nilainya maka sekolah akan memanggil orang tua siswa atau sekolah mendatangi rumah untuk membicarakan secara khusus dengan orang tua.	
		B: Iya, dari hasil belajar siswa sekolah akan memanggil anak yang nilai pelajarannya kurang.	
		C: Iya ada, sekolah	

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		menginformasikan mengenai model-model dan inovasi dalam pembelajaran serta menyusun pembelajaran yang inovatif.	
	b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar proses pembelajaran?	A: Bentuknya dengan memotivasi anak supaya semangat belajar, memonitor anak supaya mengerjakan PR.	2
		B: Mengawasi anak belajar dan memberikan dorongan supaya anak rajin belajar.	2
		C: Bersama sekolah mengembangkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk semua mata pelajaran, serta mengembangkan model-model dan inovasi dalam pembelajaran.	2
11.	Mengenai terlaksanya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan.		2
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan?	A: Iya, sekolah menginformasikan bahwa sekolah menginformasikan bahwa sekolah memerlukan beberapa alat pembelajaran seperti buku, white board, komputer.	
		B: Iya, sekolah juga menginformasikan untuk rehab atau pengembangan gedung	

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		sekolah.	
		C: Iya, sekolah menyampaikan proposal mengenai kebutuhan sekolah dalam hal sarana dan prasarana terutama untuk media pembelajaran dan program rehabilitasi gedung atau bangunan.	
	b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan?	A: Dari segi pendanaan, kami tidak mampu untuk membantu dan pernah memberikan bantuan tetapi hanya sedikit. Dari sisi tenaga, kami pernah membantu sekolah memperbaiki saluran air dan membantu mengamankan material (bahan bangunan untuk rehab gedung sekolah).	2
		B: Membantu sekolah memperbaiki saluran air dan juga mengawasi pembangunan rehabilitasi gedung.	2
		C: Sebagai fasilitator menghubungkan antara sekolah, masyarakat, dan instansi secara vertikal (dinas pendidikan, dan depdiknas) supaya sekolah mendapatkan bantuan rehab. Tetapi dari segi pendanaan, komite sekolah belum mampu untuk memberikan bantuan secara cukup (hanya dalam	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		bentuk sumbangan sukarela).	
12.	Mengenai terlaksananya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar kompetensi kelulusan.		2
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam pengembangan standar kompetensi kelulusan?	A: Iya, setiap pembagian rapor, sekolah menginformasikan mengenai perkembangan prestasi akademik.	
		B: Iya, setiap akhir semester orang tua diinformasikan mengenai standar kelulusan (penerimaan rapor).	
		C: Iya, komite sekolah mengetahui informasi mengenai pengembangan pembelajaran model PAKEM.	
	b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar kompetensi kelulusan?	A: Diundang sekolah dalam rapat pertemuan untuk membahas model pembelajaran yang aktif dan bagaimana caranya mengembangkan jam pelajaran untuk 4 mata pelajaran secara efektif.	2
		B: Diundang sekolah tetapi saya tidak hadir dalam pertemuan.	2
		C: Komite sekolah bersama dengan orang tua secara bersama-sama memberikan masukan kepada sekolah untuk meningkatkan	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		mutu lulusan dengan menetapkan standar kelulusan dan standar ketuntasan belajar setiap mata pelajaran. Melakukan koordinasi antara sekolah dengan orang tua dalam mengembangkan potensi belajar siswa dan membantu dalam mengembangkan pembelajaran model PAKEM.	
13.	Mengenai terlaksananya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam peningkatan mutu kelembagaan dan manajemen.		
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam peningkatan mutu kelembagaan dan manajemen?	A: Iya, sekolah menjelaskan mengenai konsep MBS pada setiap pertemuan dengan orang tua siswa.	
		B: Iya, pernah mendengar.	
		C: Iya, sekolah bersama komite sekolah menyusun mengenai program kegiatan manajemen sekolah.	
	b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan mutu kelembagaan dan manajemen?	A: Diikutsertakan oleh sekolah dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah, diundang dalam rapat pertemuan yang membahas mengenai manajemen pengembangan sekolah.	2
		B: Pada saat terima rapor, saya	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		diminta oleh sekolah untuk memberikan saran atau pendapat tetapi saya kurang mengetahui mengenai konsep kelembagaan dan manajemen sekolah.	
		C: Komite sekolah membantu sekolah dalam meningkatkan manajemen sekolah dengan membantu sekolah menyusun program kegiatan dalam pengembangan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Membantu sekolah dalam menciptakan budaya disiplin dan menjalin sikap kooperatif dengan semua unsur sekolah, orang tua dan masyarakat.	2
14.	Mengenai terlaksananya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar pembiayaan pendidikan.		2
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam pengembangan standar pembiayaan pendidikan?	A: Iya, orang tua diberitahukan oleh sekolah memerlukan pendanaan dalam mendukung program sekolah.	
		B: Iya, saya hanya mendapatkan informasi sedikit.	
		C: Iya, mengenai informasi peningkatan pengembangan pendidikan.	

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
	b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar pembiayaan pendidikan?	A: Pernah diajak sekolah untuk berpartisipasi dalam hal pendanaan, tetapi kami sebagai orang tua hanya bisa membantu sedikit.	2
		B: Orang tua kurang bisa membantu dalam segi pendanaan karena kami tidak mampu (keterbatasan ekonomi).	2
		C: Pengembangan pembiayaan pendidikan melibatkan komite sekolah supaya pengelolaan pembiayaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Komite sekolah hanya melakukan pemantauan.	2
15.	Mengenai terlaksananya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar penilaian.		
	a. Apakah orang tua dan komite sekolah mendapatkan informasi yang cukup dalam pengembangan standar penilaian?	A: Iya, ada informasi dari sekolah.	
		B: Iya, pernah pernah mendengar.	
		C: Ada dengan melibatkan komite sekolah.	
	b. Bagaimana bentuk partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengembangan standar	A: Sekolah mengundang orang tua untuk membahas mengenai penilaian untuk semua mata	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
	penilaian?	pelajaran dan pembelajaran atau dalam menetapkan kriteria penilaian untuk semua mata pelajaran.	
		B: Orang tua diberikan kesempatan untuk menyumbangkan pikiran atau memberikan saran untuk bersama sekolah menetapkan kriteria penilaian semua mata pelajaran.	2
		C: Sekolah bersama orang tua terlibat dalam peningkatan sistem penilaian dalam pembelajaran atau akhir kegiatan pembelajaran dengan melakukan kerjasama yang baik dalam menetapkan kriteria penilaian, menetapkan aspek-aspek penilaian untuk semua mata pelajaran.	2
16.	Mengenai faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat.		
	Apa saja faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan manajemen berbasis sekolah?	A: Keterbatasan ekonomi dari orang tua siswa. Kami rata-rata hanya bekerja sebagai buruh pabrik dan wiraswasta usaha kecil.	3
		B: Kemampuan ekonomi yang terbatas.	3
		C: Dengan adanya sekolah gratis, sekolah sudah tidak boleh	3

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>memungut lagi kepada orang tua sehingga program sekolah menjadi terhambat (dari segi pendanaan) padahal dimungkinkan bagi masyarakat untuk menyumbang secara sukarela. Disamping itu, penghasilan rata-rata penduduk Kalideres rendah.</p>	
	<p>Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi?</p>	<p>A: Sekolah lebih aktif untuk mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah</p>	4
		<p>B: Dengan menyadarkan masyarakat pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, karena di sini masyarakat kurang peduli dengan pendidikan</p>	4
		<p>C: Sekolah dan masyarakat secara bersama-sama duduk untuk membahas permasalahan yang ada dan menggalang partisipasi masyarakat dalam bentuk apapun, karena jika mengharap sumbangan dalam bentuk materi tidak mungkin, karena keterbatasan ekonomi masyarakat.</p>	4

Kode :

1. Partisipasi aktif orang tua dan komite sekolah
2. Bentuk Partisipasi orang tua dan komite sekolah
3. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi
4. Upaya mengatasi hambatan

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara tanggal 8 Desember 2009

Informan Utama : Bapak H. Dani (Ketua RW 06 Kecamatan Kalideres)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap sekolah di kecamatan Kalideres?	Anak-anak tidak sekolah tinggi, dan cenderung langsung kerja dan menikah. Kebanyakan setelah lulus SD atau lulus SMP melanjutkan ke pesantren sehingga tidak mengikuti kurikulum Departemen Agama. Itu juga hanya bagi yang tamat. Sementara untuk yang perempuan setelah lulus dan mendapatkan ijazah lalu menikah.	1
2.	Apakah warga membantu kegiatan sekolah?	Di lingkungan kita belum ada, dahulu pernah ada dalam kegiatan jahit-menjahit.	1
3.	Pernahkan diundang oleh sekolah untuk terlibat dalam kegiatan sekolah?	Hanya terbatas pada kegiatan ambil rapor namun hanya terbatas pada kehadiran dan tidak memberikan pendapat dalam rapat. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan sekolah.	1
4.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam implementasi		1

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
	kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dikaitkan dengan delapan standar nasional pendidikan?		
5.	Apa saja hambatan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah?	Dari segi lingkungan, banyak pabrik-pabrik. Penduduk berorientasi untuk bekerja karena kondisi sekitarnya adalah pekerja.	2
6.	Bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut?	Ada penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan kepada warga oleh pemerintah. Atau melalui pelaksanaan program-program seperti KEJAR PAKET.	3

Kode :

1. Partisipasi masyarakat
2. Faktor-faktor yang menghambat
3. Upaya untuk mengatasi hambatan

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal : 12 Desember 2009

Informan Utama : Bapak Drs. Suyadi (Ketua LSM)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Sejauh mana LSM mengetahui implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah?	<p>Akhir-akhir ini MBS menjadi trend dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, bahkan Mendiknas dalam Munas IV di Jakarta sudah menyetujui untuk diberlakukannya MBS sebagai salah satu pendekatan peningkatan mutu pendidikan. Berbicara masalah MBS, berarti ada empat hal yang harus dimengerti, yaitu transparansi manajemen sekolah, peningkatan otonomi sekolah, pembelajaran aktif, efektif dan menyenangkan atau joyfull learning serta partisipasi masyarakat.</p> <p>Kalau sekolah sudah menetapkan MBS sebagai pilihannya dalam mengelola pendidikan di sekolahnya, maka hal pertama yang harus di lakukan adalah melakukan manajemen terbuka (transparan). Transparansi tidak saja menyangkut keuangan, tetapi harus melibatkan keseluruhan komponen pendidikan di sekolah, mulaidari perencanaan/penyusunan program, pelaksanaan kegiatan di sekolah, sistem penilaian, sistem kenaikan kelas, pembelajaran di kelas, kenaikan pangkat</p>	

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		guru, penggunaan buku untuk murid dan guru. Transparansi juga harus menyentuh sistem pertanggung jawaban sekolah, sekolah tidak saja bertanggung jawab kepada pemerintah tetapi juga ke masyarakat.	
2.	Bagaimana peranan atau keterlibatan LSM dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah?	Kami selaku lembaga independen hanya bisa membantu dari segi non finansial, misalnya pada bulan agustus kemarin membuat kegiatan penyuluhan pendidikan reproduksi ke beberapa SMP di Jakarta Barat. Disamping itu kami juga terlibat dalam kepengurusan dewan pendidikan jakarta barat sebagai salah satu unsur dari masyarakat membantu untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan (<i>Advisory</i>). Disamping itu juga sebagai pendukung baik yang berwujud pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan (<i>Supporting</i>).Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan (<i>Controlling</i>). Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat (Mediator).	1
3.	Bagaimana partisipasi	Kami bersama sama dengan dewan	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
	<p>LSM dalam penyusunan KTSP/kurikulum di sekolah?</p>	<p>pendidikan terlibat dalam memberikan pelatihan dalam penyusunan modul-modul KTSP yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, misalnya pada bulan April kemarin diundang oleh sebagai salah satu instruktur dalam workshop pengembangan model KTSP kepada guru-guru SMP se Jakarta Barat di Puncak.</p> <p>Setelah bertugas di workshop tersebut, kami melaporkan hasilnya kepada dinas Pendidikan sejauh mana kemampuan guru terlibat dalam penyusunan KTSP dan dalam implementasinya dalam melaksanakan pembelajaran sesuai KTSP.</p>	
4.	<p>Bagaimana partisipasi LSM dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah?</p>	<p>Karena kami tidak memiliki anggaran untuk membantu dari segi finansial, maka kami tidak dapat memberikan bantuan kepada sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana. Hanya saja kami sebagai fasilitator sekolah dengan pihak dunia usaha untuk menyampaikan kebutuhan sekolah dalam hal sarana prasarana, namun sejauh ini baru sedikit pihak perusahaan yang membantu, seperti memberikan bantuan Air Conditioner ke beberapa sekolah. Kami melihat potensi dunia usaha untuk membantu sangat besar, karena di daerah Jakarta barat khususnya Kalideres banyak industri</p>	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>besar dan kecil yang beroperasi disini. Oleh karena itu peran aktif sekolah dalam menyusun program sekolah dan proposal untuk diajukan ke pada perusahaan harus ditingkatkan, karena bantuan itu tidak datang dengan sendirinya tanpa ada usaha dan harus menjemput bola kepada perusahaan/industri tersebut, kami sebagai fasilitator sifatnya hanya membantu saja, mempertemukan antara sekolah dengan pihak perusahaan.</p>	
5.	<p>Bagaimana partisipasi LSM dalam membantu siswa dalam proses belajar mengajar, pembelajaran?</p>	<p>Kami juga terlibat bersama dewan pendidikan dalam pola-pola pembelajaran yang bagus, dan merintis model ujian nasional dimana peran LSM bersama dewan pendidikan Jakarta Barat sebagai pemersatu dan kesatuan bangsa, karena jika ujian yang diterapkan sama seperti sekarang dan tidak di follow up, maka sebagian propinsi di Indonesia akan lepas seperti Papua, Maluku, Aceh akan berdiri sendiri pada 20 atau 30 tahun mendatang. Model ujian akan dirombak dengan mengembangkan dan menguji civic nation (wawasan kebangsaan dan kewarganegaraan) kepada siswa, sehingga mereka menjadi tahu Indonesia adalah negara maju, dan besar. Mata pelajaran lainnya yang diuji adalah bahasa inggris, bahasa indonesia dan</p>	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>matematika (mengacu pada 3R, yaitu baca, tulis, hitung). Namun sekarang civic nation tidak diujikan atau dibuang, IPS seperti sejarah juga. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura menerapkan civic nation kepada siswa TK dan SD, seperti keharusan siswa untuk mengikuti upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari sebelum sekolah dimulai. Sedangkan di negara kita, upacara bendera dilaksanakan setiap senin, itu juga kalau ada (di sekolah swasta biasanya tidak wajib). Rasa nasionalisme harus dikembangkan sejak dini. Konsep harus didasarkan dari atas, ditanamkan rasa nasionalisme mulai dari pajabat negara.</p> <p>Model ujian yang dilaksanakan oleh negara kita juga kurang bagus (sistem multiple choice). Kelemahan multipe choice, siswa bisa menebak jawaban tanpa harus berpikir, dan nilai menjadi urusan terakhir, sedangkan dahulu model ujian yang dikembangkan adalah model essai, dan di negara barat juga menerapkan model essai. Indikasi kecurangan ujian nasional semakin merebak, karena berdasarkan pengalaman saya sebagai tim independen ujian nasional tahun lalu, terbukti berdasarkan laporan lapangan beberapa orang guru</p>	

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		memberikan kunci jawaban kepada siswanya.	
6.	Bagaimana partisipasi LSM dalam pembiayaan pendidikan pada sekolah?	Kami tidak dapat membantu sekolah dalam hal pembiayaan , seperti yang saya kemukakan diatas, karena LSM hanya mempunyai anggaran internal untuk operasional saja, sedangkan untuk membantu sekolah kami bekerjasama dengan pihak luar seperti Dinas Pendidikan, dan dunia usaha sebagai fasilitator, pemberi pertimbangan, controlling, supporting dan mediator bersama-sama dengan dewan pendidikan	2

Kode :

1. Peranan
2. Bentuk Partisipasi

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara tanggal 3 Desember 2009

Informan Pendukung : Bapak Darwin Nainggolan (Kepala Sekolah SMP Negeri 278) Bapak Tudju (Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 278)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
7.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP negeri 278 Jakarta Barat?	<p>Kepsek:</p> <p>Partisipasinya rendah. Tidak terlalu signifikan dengan yang dulu. Setelah diteliti dari hasil, sepertinya lebih baik yang dulu.</p> <p>Rupanya lain lingkungan, lain motivasi. Contoh di Danau Toba, untuk penduduk sekitar yang umumnya petani. Akan tetapi dorongan dari orang tua besar. Kalau disini motivasinya berbeda, hanya berdasarkan bayaran sesaat. Sehingga adanya bantuan pemerintah malah mengurangi motivasi.</p> <p>Pendidikan dilakukan melalui sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kita berusaha untuk meningkatkan pendidikan melalui sekolah dan keluarga karena kalau melalui masyarakat kita tidak bisa atur. Sehingga kita juga melakukan pendekatan kepada keluarga.</p>	1

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>Pak Tudju:</p> <p>Dalam artian perubahan ke siswa, antusias belajar misalnya, bisa dibilang 50-50.</p> <p>Ada sekelompok yang bilang, tidak bayar ini. Namun ada juga yang tambah semangat. Dilatarbelakangi juga oleh latar belakang pendidikan orang tua di sekitar sini. Banyak yang tidak tamat SD sehingga bisa terlihat pola pikir mereka terhadap putra-putri mereka.</p> <p>Dengan kata lain, ada perubahan tapi tidak sebesar yang diharapkan.</p>	
8.	Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres?	<p>Kepsek:</p> <p>Kemungkinan karena merasa tidak membayar. Kalau dahulu merasa sudah membayar maka perlu belajar sebagai dasar motivasinya.</p> <p>Sebagai contoh apabila ada anak yang dalam beberapa hari berturut-turut tidak masuk sekolah. Ada yang beralasan terlambat bangun. Rata-rata siswa di sini tinggal di sekitar sekolah yang dapat dicapai</p>	3

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>dengan jalan kaki. Sehingga misalnya pun terlambat bangun, masih dapat mengejar sisa jam pelajaran yang masih ada. Dalam hal ini ada peran orang tua untuk membangunkan anaknya untuk berangkat sekolah.</p> <p>Di sini ada kebijakan kalau siswa tidak masuk 2 (dua) hari berturut-turut, maka kita panggil orang tuanya guna kita berikan motivasi.</p> <p>Disekitar sini masih banyak penduduk yang bekerja sebagai petani dan buruh.</p> <p>Peran orang tua sangat menentukan.</p> <p>Pak Tudju: Peran orang tua untuk mendukung anaknya sangat kurang.</p>	
9.	Bagaimana Peran sekolah dalam hal ini Bapak sebagai Kepala sekolah untuk berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Sekolah?	<p>Kepsek: Sudah kita undang orang tua siswa dalam rapat awal tahun untuk membicarakan program sekolah terutama yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan</p> <p>Kita juga melakukan pendekatan seperti misalnya ada anak yang tidak masuk, kami undang orang tua untuk datang ke sekolah untuk</p>	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		membicarakan dengan orang tua.	
10.	Bagaimana peranan sekolah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan standar kelulusan?	Kepsek: Kita harus mati-matian untuk meluluskan. Tidak didasarkan pada motivasi untuk maju, tetapi didasarkan pada kebiasaan.	2
11.	Sejauh mana respon masyarakat terhadap program sekolah?	Kepsek: Biasanya orang tua kita undang, tapi sedikit yang datang.	
12.	Dengan kata lain dengan adanya kebijakan sekolah gratis partisipasi masyarakat berkurang?	Kepsek: Sepertinya begitu. Bisa jadi hal ini merupakan masa transisi.	
13.	Bagaimana menurut Bapak upaya untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat?	Kepsek : Peranan orang tua siswa untuk mendorong anaknya belajar sangat penting, masyarakat harus lebih sadar untuk menyekolahkan anaknya	4

Kode :

1. Bentuk partisipasi masyarakat
2. Peranan Kepala Sekolah
3. Faktor-faktor menghambat
4. Upaya mengatasi hambatan

TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Tanggal : 1 Desember 2009

Informan Pendukung : Kepala Sekolah SMP Negeri 225 (Bapak Drs. Rahmat Hidayat)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 225 Jakarta Barat dalam pengembangan kurikulum/KTSP?	SMP Negeri 225 merupakan salah satu SMP Negeri yang telah berstatus SSN (Sekolah Standar Nasional) dimana sekolah harus memenuhi semua standar yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 24 tahun 2006 dan No. 6 tahun 2007, bahwa sekolah wajib mengembangkan Standar Isi menjadi kurikulum yang berlaku di sekolah. Sehingga sekolah secara mandiri harus mampu membuat kurikulum sendiri yang dilaksanakan secara komprehensif dan fleksibel dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju serta berkala untuk merespon perubahan kebutuhan siswa dan masyarakat serta perubahan sistem pendidikan maupun perubahan sosial, lalu integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata pelajaran	1

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi dewan pendidik, komite sekolah, pemakai lulusan dan alumni.</p> <p>Dalam hal ini, SMP Negeri 225 untuk melaksanakan pengembangan KTSP dan evaluasi implementasi KTSP secara mandiri, melakukan langkah-langkah antara lain menyusun panduan pengembangan KTSP dan evaluasi pelaksanaan KTSP, melaksanakan pemetaan terhadap standar isi ke dalam program semesteran, membuat buku yang berisi visi, misi, tujuan dan sebagainya, membuat buku yang berisi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan validasi terhadap buku, memperbaiki dan menyempurnakan hasil validasi buku, membuat panduan pembelajaran, membuat panduan penilaian, mendokumentasikan KTSP untuk kelas 7-9, mensosialisasikan KTSP yang sudah disusun/dikembangkan,</p>	

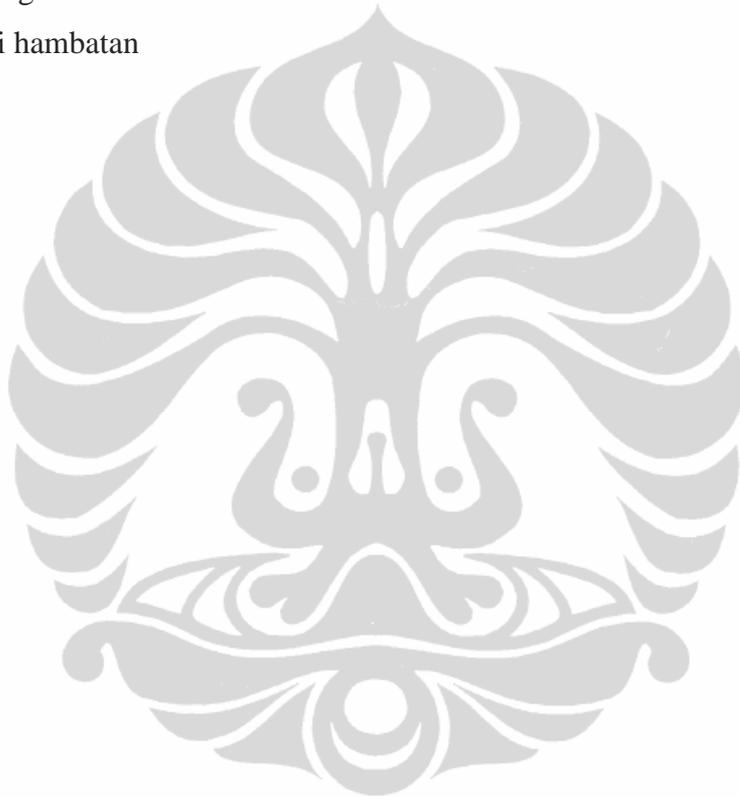
No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>melaksanakan pembelajaran dengan KTSP yang telah disusun dan melaksanakan evaluasi keterlaksanaan KTSP di sekolah.</p> <p>Yang berkaitan dengan penyusunan KTSP, orang tua terlibat melalui komite. Komite mewakili unsur-unsur masyarakat, guru, siswa, tenaga tata usaha, berikut Dewan Pendidikan kota juga dilibatkan.</p>	
2.	<p>Bagaimana partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 225 Jakarta Barat dalam standar pembiayaan atau pendanaan?</p>	<p>Orang tua kita himbau untuk menyumbang, namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau di sini kurang karena menengah ke bawah. Namun secara umum, prestasi naik, sehingga dipilih SSN di Kalideres.</p> <p>Dari segi saran, ide, non-materi.</p> <p>Ada. Misalnya dalam menentukan waktu belajar. Ataupun dalam pengembangan sarana sekolah seperti penyediaan ac, orang tua memberi solusi untuk mencari.</p>	1
3.	<p>Bagaimana partisipasi komite sekolah dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis</p>	<p>Peran komite sekolah. Komite sekolah terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya dalam</p>	1

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
	Sekolah di SMP Negeri 225 Jakarta Barat?	penyusunan program, anggaran, menyampaikan informasi ke masyarakat. Menjalankan fungsinya melakukan kontrol, sebagai media ke masyarakat. Setiap tahun ada musyawarah orang tua/wali murid yang diselenggarakan komite.	
4.	Bagaimana partisipasi LSM dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 225 Jakarta Barat?	Peran LSM setiap semester memberikan informasi tambahan kepada siswa, misalnya mengenai masalah narkoba, dan reproduksi anak. Ada juga dari kepolisian. Dunia usaha belum aktif dalam hal pendanaan-pendanaan kegiatan. Ada misalnya dari flexi, tapi belum maksimal. Akan tetapi hal tersebut sudah dirintis.	1
5.	Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres?	Hambatan yang dihadapi sekolah dalam implementasi MBS. Input (masukan siswa) yang rendah, sehingga outcomenya tidak begitu bagus di masyarakat. Rata-rata melanjutkan ke SMA.	2
6.	Bagaimana upaya mengatasi hambatan –hambatan tersebut?	Susah, karena masalah dari masyarakat itu sendiri, jika masyarakat mau berubah dari segi kesadaran dan peran aktifnya	3

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		dalam pendidikan maka masalah akan bisa diatasi	

Kode :

1. Bentuk partisipasi masyarakat
2. Faktor-faktor menghambat
3. Upaya mengatasi hambatan



TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip wawancara tanggal 10 Desember 2009

Informan : Bapak Kir Haryana

(Seksi Pemberdayaan Sekolah Direktorat Pembinaan SMP)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
14.	Karena pengambil kebijakan MBS itu dari sini, apa peranan pemerintah pusat dalam hal ini direktorat SMP dalam implementasi MBS?	<p>Konkritnya adalah pertama-tama membuat regulasi dalam kerangka pembinaan yaitu amanat UU Sistem Pendidikan, PP No.19, PP No. 48, PP 32.</p> <p>Kita harus membuat semacam regulasi namun lebih teknis, karena disebut panduan-panduan untuk pembinaan. Tetapi kalau regulasi semacam UU, PP, Permen namanya regulasi formal yang merupakan peranan pemerintah pusat. Sedangkan direktorat mengimplementasikan regulasi itu menjadi panduan-panduan pembinaan yang isinya bisa konsel atau penjabaran lebih operasional dari peraturan itu.</p> <p>Yang kedua, sesuai dengan kewenangan. Hanya berwenang melakukan pembinaan kelembagaan manajemen, tidak sampai SDM, sarana. Dalam kaitannya dengan direktorat SMP subdit kelembagaan itu hanya membina melaksanakan</p>	1

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>manajemen sesuai dengan tupoksi.</p> <p>Mulai 99-sekarang esensinya sama, secara konsep sama hanya ganti-ganti nama.</p> <p>Yang keempat, lebih teknis lagi adalah bagaimana caranya melalui program-program terintegrasi misalnya ada program SBI, SSN, sekolah potensial, SMP terbuka, dan semuanya harus manajemen berbasis sekolah.</p> <p>Disamping membuat panduan-panduan tadi, dalam membuat implementasi pembinaan, kita panggil dalam workshop SSN ada materi MBS. Kemudian pada saat-saat tertentu ada monitoring evaluasi MBS.</p>	
15.	Ada upaya dari direktorat untuk mendorong partisipasi masyarakat?	<p>Misalnya melalui pelibatan perguruan tinggi melalui program KKN.</p> <p>Yang kedua pelibatan masyarakat umum, orang tua, dunia usaha terwadah dalam komite sekolah sesuai Kepmendiknas 48. Tapi dalam hal teknis, mereka harus secara internal membantu dirinya. Pemerintah hanya membuat regulasinya saja. Dorongan kepada mereka ketika kita workshop kita panggil juga komitenya.</p>	3

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>Ada blok grant untuk dewan pendidikan.</p> <p>Setiap sekolah dalam membuat RKS harus bersama komite dan ditandatangani komite.</p>	
16.	Kaitannya dengan SSN, apakah masyarakat harus terlibat dalam setiap komponen standar nasional pendidikan?	<p>Pengertian semuanya iya. Tapi kalau sudah masuk kedalamnya ada pembagian kewenangan. Misalnya dalam pengembangan kurikulum, masyarakat tidak mempunyai kewenangan, tapi merupakan kewenangan guru sesuai dengan undang-undang. Guru dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan prinsip relevansi, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.</p> <p>Dalam SMK, misalnya lulusan STM harus diterima dunia usaha. Kalau SMP, kalau masyarakat perguruan tinggi memberikan wawasan, masukan, konsep, atau ketika menyusun kurikulum implementatif perguruan tinggi mesti dimintai bantuan. Karena di pusat hanya ada standar isi tidak ada kurikulum.</p> <p>Yang kedua, ada muatan lokal. Kurikulum tergantung lokalnya masing-masing. Di sini masyarakat berperan untuk membantu masyarakat berperan melaksanakan</p>	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>kurikulum ini.</p> <p>Dalam PBM, prinsipnya sama. Kalau dalam mengajar tidak mungkin tapi dalam memfasilitasi sangat mungkin.</p> <p>Kalau dalam hal evaluasi, itu juga tidak bisa langsung masuk. Tergantung sekolahnya juga. Misalnya pelajaran agama di Madura, 50% oleh ustadz, 50% oleh guru. Kesimpulannya, dalam hal penilaian masyarakat sifatnya adalah controlling, bagaimana guru menilai, sesuai fakta atau tidak, terutama yang sifatnya adalah moral. Dalam bidang manajemen, banyak, mulai dari merencanakan sekolah, merencanakan program, sampai mengontrol tapi tidak memberikan kelebihan kewenangan, sebatas memberikan masukan. Sarana, biaya, tenaga pembantu, sangat boleh.</p>	
17.	Apakah sudah seharusnya masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan kurikulum melalui komite sekolah bersama-sama sekolah?	<p>Undang-Undangnya begitu. Kurikulum itu jabaran dari standar isi, standar kompetensi lulusan, rencana pembelajaran, rencana evaluasi. Kurikulum itu sudah satu bentuk program. Meliputi bagaimana mulai dari visi, misi, SKL, silabus, panduan-panduan</p>	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>pembelajaran.</p> <p>Masyarakat bisa membantu menyusun itu semua tapi melalui komite, kecuali perguruan tinggi. Misalnya sekolah dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Sebelum itu dia mengundang perguruan tinggi untuk memberikan wawasan pengembangan substansi kompetensi. Karena pusat hanya mengatur standar isi.</p> <p>Makanya disekolah sampai ada MGMP sekolah, kabupaten, dan seterusnya untuk mengatasi guru-guru yang seperti ini, tapi akhirnya kembali lagi karena ketika mengajar lebih mengerti yang lain. Selama ini guru ini tidak ada yang mengontrol sampai sejauh itu.</p> <p>Mulai dari rekrutmen, guru matematika tidak dites matematika tapi pancasilanya bagaimana, bahasanya.</p>	
18.	Hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah?	Ada 5 hambatan, misinformasi, secara politik, tetapi universal dan belum detail dan bukan hambatan teknis di sekolah. Kalau di sekolah lebih banyak hambatan implementasi MBS, mengurai dari itu. MBS tidak jalan karena bupati	4

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>tidak melaksanakan berbagai regulasi yang terkait dengan pendidikan. Dinas sendiri tidak mau bersikap apa-apa karena hal ini merupakan underbonenya bupati.</p> <p>Dari sisi kepengawasan, subdin juga tidak bisa berbuat apa-apa karena tergantung kepala dinas, dan kepala dinas tergantung bupati. Hambatan lebih detail dari birokrasi.</p> <p>Paling menonjol hanya tidak ada kebijakan atau sistem yang mendukung MBS. Dan yang kedua, hambatannya adalah dari internal sekolah. Kurang bisa menciptakan situasi yang transparan, akuntabel, kooperatif-kolaboratif, bermitra, partisipasi. Tidak ada kebijakan yang membuka itu semua. Hambatan utamanya adalah manajer. Mestinya seperti swasta, manajer sekolah itu harusnya lulusan manajemen.</p> <p>Solusi berupa penataran kepala sekolah belum mengatasi masalah yang sebenarnya.</p> <p>Disamping hambatan politik, birokrasi, dan internal sekolah, masyarakat tidak memiliki kepedulian “tidak menyadari itu untuk anaknya”. Untuk itu harus ada</p>	

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		<p>penjelasan, pencerahan, bahwa mereka salah persepsi. Hambatan ekonomi dan sosial ini yang menentukan mereka untuk berpartisipasi langsung.</p> <p>Bagi mereka yang golongan menengah ke atas kadang dengan kebijakan, birokrasi akhirnya terhambat. Hanya mereka yang berani ke kepala sekolah yang menerjang semuanya itu. Faktor leadership, karena tidak semua kepala sekolah berani mengambil resiko. Maka dalam Permendiknas tentang kepala sekolah, salah satunya harus berorientasi manajer dan enterpreneur. Banyak sekolah yang memberdayakan partisipasi tidak memberdayakan komite tapi paguyuban-paguyuban. Tetapi manajemen keuangan tidak dicampuri oleh sekolah, misalnya dalam pemasangan AC, atau lapangan basket.</p> <p>Dalam manajemen yang polanya seperti itu bisa mengatasi kendala yang sifatnya birokrasi. Salah satu solusinya adalah melalui keberanian kepala sekolah. Karena kalau membuat peraturan dia dipecat.</p>	

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
		Ini adalah peran masyarakat yang langsung.	
19.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Jakarta?	<p>Di Jakarta susah, karena segala-galanya difasilitasi pemerintah. Kalau untuk MBS dalam esensi filosofinya sesungguhnya tidak jalan. Hanya jalan dalam kerangka mengatur dirinya.</p> <p>Kalau di Jakarta, orang kaya yang penting anaknya pintar, bayarannya berapa tidak masalah. Ini boleh dikatakan partisipasi.</p> <p>Di Jakarta, MBS dalam pengertian semu. MBS dalam pengertian kerjasama, transparansi, partisipasi yang diskenario. Bisa dikatakan rendah partisipasinya. Hanya sekolah yang bagus-bagus yang orang tuanya bayar.</p> <p>Dalam hal kerjasama jalan, dalam hal kemandirian tidak sepenuhnya.</p> <p>MBS di Jakarta dengan MBS di Ngawi berbeda karena sudah dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan propinsi.</p>	2

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
20.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Jakarta (dalam konteks RSBI)?	Kalau itu memang aturannya boleh. Hanya sekolah-sekolah yang bagus. Misalnya orang tua murid atau komite menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan mutu anaknya sudah merupakan partisipasi bukan hanya uang yang diberikan kepada sekolah termasuk supporting material, pemikiran, moral, sarana, tenaga. Di Jakarta yang menonjol materi.	2

Kode :

1. Peranan pemerintah pusat dalam implementasi MBS
2. Partisipasi masyarakat dalam Implementasi MBS
3. Upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat
4. Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat